



► KAWASAN PERMUKIMAN

Bantaran Kali Bakal Ditata Ulang

JOGJA—Longsornya talut Kali Code yang berdampak pada kerusakan permukiman warga Prawirodirjan RT 59 RW 18, Gondomanan, beberapa waktu lalu mendorong Pemkot Jogja mengevaluasi penataan kawasan bantaran kali. Pemkot akan mengevaluasi permukiman penduduk di seluruh bantaran kali, termasuk Kali Code.

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Agus Tri Haryono mengatakan seharusnya bantaran sungai bebas

► Rencana penataan kawasan permukiman di bantaran kali menyusul longsornya talut Kali Code beberapa waktu lalu.

► Penataan kawasan bantaran kali berpedoman pada aturan tentang garis sempadan sungai.

dari bangunan. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.28/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan danau. Disebutkan jarak sempadan sungai di perkotaan yang memiliki tanggul adalah tiga meter. Sedangkan sungai yang belum dilengkapi tanggul memiliki garis sempadan 10 meter.

"Ada jarak antara rumah warga dengan bibir sungai. Ke depan kami akan lakukan lagi evaluasi. Sebab masih ada warga yang belum siap untuk memundurkan rumahnya, ada juga yang siap mundur," katanya, Sabtu (8/12).

Pemkot kata dia sejatinya memiliki program penataan permukiman warga melalui Program

sebagian rumahnya untuk jalan. Pemkot mendanai perbaikan rumah warga terdampak.

Rumah yang menjadi sasaran perbaikan untuk tahun ini terdapat 50. Seluruhnya berada di bantaran Kali Gajah Wong di Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, dan Baciro, Kecamatan Gondokusuman.

Terkait dengan rumah warga di Kampung Prawirodirjan RT 59 RW 18 Gondomanan yang rusak akibat longsor talut Kali Code, Agus mengaku akan dilakukan penataan. Hanya saja, konsep penataan nantinya lebih dulu dibicarakan bersama warga.

"Apakah dengan model M3K atau lainnya akan dilihat dulu kesepakatan dengan warga. Bagaimana pun, talut adalah fasilitas publik dan ruang bantaran sungai sehingga keliru jika untuk tempat tinggal," katanya.

Pemerintah saat ini memperbaiki talut dengan cara memasang bronjong. Perbaikan tersebut bersifat sementara dan untuk

Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Termasuk mengimplementasikan ide Gubernur DIY terkait konsep Mundur Munggah Madhep Kali (M3K).

Penataan kawasan model M3K ini sudah dilakukan di beberapa lokasi seperti di Kelurahan Muja Muju, Baciro, Pandeyan, Giwangan, Warungboto dan Gedongkiwo.

"Road Map penataan dilakukan secara berjenjang. Permukiman di bantaran Sungai Gajah Wong di Muja Muju jadi contoh penataan," ujarnya.

Ide M3K ini diawali dengan membuat jalan inspeksi. Sebagian jalan inspeksi dibangun dengan cara mengepras sebagian rumah warga. Sebagai bentuk apresiasi atas kesadaran warga yang merelakan

Instansi		Tindak Lanjut
1. PUPKP		Ditanggapi
2. PPK		Diketahui
3. Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005